Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 29147-29153

Telaah Filosofis Atas Pendidikan Sebagai Layanan Publik

Binti Rizqi Dinianti[1], Nuraini[2], R A Nurul Uyun[3], Rahma Aprilia[4], A Muhammad Rivan Triagusman[5], Muhammad Dzaky[6], Afriantoni[7]
UIN Raden Fatah Palembang[1,2,3,4]
dinianti91@gmail.com[1], nuraini717537@gmail.com[2], uyunnurul1090@gmail.com[3], rahmaaprilia985@gmail.com[4], rivantriagusmann@gmail.com[5], dzakyy69@gmail.com[6], afriantoni@radenfatah.ac.id[7]

Published: May , 2026

ABSTRACT

Education as a public service plays a crucial role in shaping human quality and civilization. A philosophical review of education demonstrates that it is not merely a process of transferring knowledge, but rather a fundamental effort to actualize the essence of humans as moral, rational, and social beings. However, in practice, education is inextricably linked to the dynamics of human relations and power, where educational institutions often become arenas for contestation of influence, hegemony, and tools of control by those in authority. This article aims to analyze education from a philosophical perspective, particularly in relation to the nature of humans in education, the power relations that occur within it, the goals of education, and the state's responsibility to provide fair and equitable services. The method applied is a literature study with a qualitative approach. The findings of this study indicate that education as a public service must be freed from the domination of oppressive power and returned to the principles of justice, equality, and support for the interests of society as a whole. Human relations and power in education must be managed democratically so that the learning process functions as a tool of emancipation, not subjugation. In addition, the state has a moral and constitutional responsibility to ensure access to quality education for all citizens. Therefore, education must be seen as a basic right whose continuation needs to be guaranteed, not just as a commodity.

Keywords: *Education, Publik Service, Philosophy Of Education, Sosial Justice*

Pendidikan sebagai layanan publik memainkan peran penting dalam membentuk kualitas manusia dan peradaban. Tinjauan filosofis mengenai pendidikan menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar proses pengalihan ilmu, melainkan sebuah upaya mendasar untuk mengaktualisasikan hakikat manusia sebagai makhluk moral, rasional, dan sosial. Namun, dalam praksisnya, pendidikan tidak luput dari dinamika relasi manusia dan kekuasaan, di mana institusi pendidikan sering kali menjadi arena kontestasi pengaruh, hegemoni, maupun alat kontrol oleh pemegang otoritas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan dari sudut pandang filsafat, terutama terkait dengan hakikat manusia dalam pendidikan, relasi kuasa yang terjadi di dalamnya, tujuan pendidikan, serta tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan yang adil dan merata. Metode yang diterapkan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan sebagai layanan publik harus dibebaskan dari dominasi kekuasaan yang opresif dan dikembalikan pada prinsip keadilan, kesetaraan, serta dukungan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Relasi manusia dan kekuasaan dalam pendidikan harus dikelola secara demokratis agar proses belajar berfungsi sebagai alat emansipasi, bukan penundukan. Di samping itu, negara mempunyai tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara. Oleh karena itu, pendidikan harus dipandang sebagai hak dasar yang perlu dijamin kelanjutannya, bukan sekadar sebagai barang dagangan.

Kata kunci: Pendidikan, Layanan Publik, Filsafat Pendidikan, Keadilan Sosial

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu fondasi utama dalam kemajuan suatu negara dan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu. Dalam kerangka kehidupan bernegara, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai proses belajar, tetapi juga sebagai layanan publik yang harus disediakan dengan adil dan merata oleh pemerintah (Faratunnisa and Afifah 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki aspek sosial,

politik, dan moral yang sangat kuat, karena terkait langsung dengan usaha menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan dalam akses, kualitas yang belum merata, dan kecenderungan untuk mengkomersialkan pendidikan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai esensi pendidikan itu sendiri, apakah pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara atau hanya sebuah produk yang bisa diperdagangkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih dalam melalui pendekatan filosofis untuk memahami makna, tujuan, dan nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan sebagai layanan publik.

Pendekatan filosofis memungkinkan kita untuk mengkaji pendidikan dari perspektif hakikat manusia, tujuan pendidikan, serta tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan bagi mereka. Dengan cara ini, melalui kajian tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai signifikasi pendidikan sebagai layanan publik yang berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur. Metode studi literatur atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Ungkapan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Mohamad Nazir 2015) yang mengatakan bahwa studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dan Karakteristik Dasar-Dasar Filisofis Pendidikan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah landasan berarti sebuah alas, dasar, atau tumpuan. Kelebihan istilah ini juga mencakup penggunaan lain sebagai fondasi. Mengacu pada penjelasan tersebut, dasar-dasar dapat dimaknai sebagai fondasi atau pijakan dari suatu hal, sebagai titik tumpu atau titik awal dari sesuatu, serta sebagai fondasi yang menopang segala sesuatu (Sutianah 2022).

Dilihat dari sifatnya, terdapat dua kategori dasar-dasar, yaitu landasan material, seperti dasar landasan pesawat dan fondasi bangunan, serta landasan konseptual, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dasar pendidikan adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan asumsi, yang mencakup gagasan, keyakinan, prinsip, pendapat, atau pernyataan yang dianggap benar dan digunakan sebagai titik tolak dalam berpikir maupun bertindak.

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu phien/philos yang berarti cinta dan sophos/sophia yang artinya kebijaksanaan, pengetahuan, atau kebenaran. Filsafat dipahami sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami hakikat segala sesuatu demi mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Dalam pencarian kebenaran ini, setiap filosof menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda, begitu juga studi yang dijadikan fokus analisis akan berbeda sesuai dengan pandangan terhadap hakikat segala masalah.

Pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan perilaku individu atau kelompok menuju kedewasaan melalui pengajaran atau pelatihan. Pada dasarnya, tujuan pendidikan adalah mewujudkan sosok manusia ideal yang sejalan dengan nilai-nilai dan norma yang dijunjung. Contoh sosok ideal yang menjadi cita-cita pendidikan mencakup individu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, sehat, cerdas, terampil, dan lain-lain (Rosita 2018). Oleh sebab itu, pendidikan harus bersifat normatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan perlu dilaksanakan berdasarkan landasan yang kuat agar tujuannya jelas, kurikulumnya tepat, serta metodenya efisien dan efektif.

Hakikat Manusia Dalam Pendidikan

Dari sudut pandang filsafat, manusia menjadi fokus utama dalam pendidikan karena setiap proses pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Manusia dipahami

tidak hanya sebagai makhluk yang mampu berpikir secara rasional, tetapi juga sebagai entitas dengan dimensi emosional, moral, sosial, dan spiritual. Oleh sebab itu, pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga harus mencakup seluruh elemen kemanusiaan untuk mencapai keseimbangan dalam pertumbuhan individu.

Pendidikan sejatinya adalah proses menghumanisasi manusia, yaitu sebuah proses yang membantu individu untuk mengetahui, mengembangkan, dan mewujudkan potensi dirinya secara keseluruhan. Dalam penelitian yang terdapat di sumber Neliti, diungkapkan bahwa pendidikan memiliki makna filosofis sebagai upaya untuk membentuk manusia seutuhnya melalui pengembangan pikiran, nilai-nilai, dan kesadaran akan realitas kehidupan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai yang membentuk karakter seseorang (Darmiyati Zuchdi 2023).

Lebih lanjut, manusia sebagai individu yang memiliki kesadaran diri memerlukan pendidikan untuk memahami posisinya dalam masyarakat. Pendidikan memberikan pedoman bagi individu untuk dapat hidup dengan makna, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari komunitas. Namun, dalam kenyataannya, sering kali pendidikan modern lebih condong pada aspek kognitif dan pencapaian akademik saja. Seperti yang diungkapkan dalam jurnal dari Ejournal Aripafi, pendidikan yang terlalu fokus pada aspek intelektual bisa saja mengabaikan pembentukan moral dan spiritual, sehingga menghasilkan individu yang pintar secara akademis tetapi minim integritas dan kepedulian sosial.

Dengan demikian, secara filosofis, pendidikan harus kembali pada hakikatnya sebagai proses pembentukan manusia secara utuh, yaitu manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter, moral yang baik, dan mampu hidup dalam harmoni di dalam masyarakat.

Relasi Manusia dan Kekuasaan dalam Pendidikan

Relasi antara manusia dan kekuasaan dalam pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu berada dalam pengaruh berbagai kekuatan, baik yang berasal dari negara, institusi pendidikan, maupun nilai dan ideologi yang hidup di masyarakat. Pengaruh tersebut tampak dalam berbagai aspek, mulai dari penentuan kebijakan, penyusunan kurikulum, penerapan metode pembelajaran, hingga pemerataan akses pendidikan (Tilaar 2003). Secara filosofis, hubungan ini bersifat dua arah. Di satu sisi, pendidikan dapat berperan sebagai sarana pembebasan. Melalui pendidikan, individu didorong untuk berpikir kritis, memahami realitas sosial, serta memiliki kesadaran untuk memperbaiki kondisi yang tidak adil. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi alat emansipasi yang mampu mengangkat manusia dari kebodohan dan keterbelakangan menuju kehidupan yang lebih bermartabat.

Namun di sisi lain, pendidikan juga dapat dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan dominasi. Sistem pendidikan bisa digunakan untuk menanamkan ideologi tertentu, membentuk cara berpikir masyarakat, dan secara tidak langsung melanggengkan ketimpangan sosial. Dalam praktiknya, hal ini dapat memperkuat posisi kelompok yang berkuasa sekaligus membatasi ruang gerak kelompok yang kurang beruntung.

Karena itu, relasi antara manusia dan kekuasaan dalam pendidikan perlu terus dikritisi. Pendidikan yang diharapkan bukanlah yang memperkuat ketidakadilan, melainkan yang mampu membebaskan manusia dan menciptakan kesetaraan dalam kehidupan sosial.

Pendidikan sebagai Sarana Transformasi Sosial

Dalam diskursus filosofis, pendidikan dipahami bukan sekadar sebagai proses transfer informasi dari pengajar ke pelajar, melainkan sebagai mesin utama transformasi sosial. Pendidikan yang progresif memiliki tanggung jawab moral untuk membongkar sekat-sekat ketidaktahuan yang selama ini membelenggu masyarakat dalam status quo. Dengan mengasah nalar kritis, pendidikan membantu individu untuk tidak hanya menerima realitas apa adanya, tetapi juga mempertanyakan struktur sosial yang timpang (Syarifudin 2025). Melalui proses ini, pendidikan beralih fungsi dari sekadar instrumen akademis menjadi kekuatan kolektif yang mampu mengubah wajah peradaban menuju tatanan yang lebih humanis.

Relevansi pemikiran Paulo Freire mengenai "pendidikan sebagai praktik pembebasan" menjadi sangat krusial dalam memahami peran ini. Freire (2005) mengkritik model "pendidikan gaya bank" yang cenderung menjadikan peserta didik sebagai bejana kosong yang pasif. Sebaliknya, pendidikan yang membebaskan mendorong adanya dialog antara pendidik dan terdidik untuk bersama-sama mengenali

realitas dunia. Ketika manusia menyadari posisi dan hak-haknya, mereka akan memiliki keberanian untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Kesadaran kritis atau *conscientização* inilah yang menjadi fondasi bagi masyarakat untuk bergerak dari keadaan tertindas menuju kemandirian yang berdaulat.

Pendidikan sebagai sarana transformasi sosial bertugas untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sejak dini. Pendidikan yang ideal memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengenali berbagai bentuk diskriminasi, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Dengan memahami kompleksitas realitas sosial, warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan solusi atas permasalahan public (Fauzi et al. 2025). Pendidikan dalam konteks ini berfungsi sebagai laboratorium demokrasi, di mana setiap orang belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dan memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan demi terciptanya kesejahteraan yang merata.

Pada akhirnya, efektivitas pendidikan sebagai agen perubahan sangat bergantung pada bagaimana sistem pendidikan tersebut dirancang dan dijalankan. Pendidikan harus mampu memutus rantai kebodohan dan keterbelakangan dengan cara menyediakan akses pengetahuan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika pendidikan berhasil mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga peka secara sosial, maka perubahan menuju masyarakat yang adil dan beradab bukanlah sekadar utopia. Transformasi sosial yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila pendidikan tetap teguh pada khitahnya sebagai alat perjuangan untuk mengangkat martabat manusia.

Pendidikan Sebagai Layanan Publik

Pendidikan dalam konteks negara modern bukan hanya sekadar pilihan kebijakan, tetapi juga merupakan amanat dari konstitusi yang menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab utama. Sebagai hak dasar, pendidikan berperan sebagai alat emansipasi yang membolehkan setiap individu untuk menyadari hak-hak lainnya. Saat pendidikan dipandang sebagai layanan publik, negara harus memastikan bahwa akses untuk mendapatkan ilmu tidak terhalang oleh batasan ekonomi, lokasi geografis, maupun latar belakang sosial. Ini memerlukan adanya perlindungan hukum yang kuat agar pendidikan tetap menjadi barang publik yang terbebas dari logika komersialisasi sepenuhnya (Prihatin and Sutangsa 2025).

Lebih jauh, kontribusi strategis pendidikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat terkait dengan pembangunan manusia secara menyeluruh. Pendidikan berfungsi sebagai pendorong dalam perubahan karakter dan kecerdasan. Tanpa adanya layanan pendidikan yang mencakup semua lapisan, akan sangat sulit untuk menghentikan siklus kemiskinan lintas generasi. Pendidikan yang diterapkan dengan standar kualitas yang merata di berbagai daerah akan menciptakan kesetaraan peluang, di mana setiap anak bangsa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing dan memberikan kontribusi bagi kemajuan negara.

Dari segi ekonomi, investasi negara di bidang pendidikan melalui layanan publik yang berkualitas merupakan strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas nasional. Pendidikan seharusnya tidak dianggap sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi dalam sumber daya manusia yang dapat memberikan hasil berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Irianto 2017). Ketika masyarakat memiliki kecerdasan dan keterampilan yang memadai, daya saing negara di arena global akan meningkat dengan signifikan. Oleh karena itu, efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi faktor penting agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kompetensi warga.

Dari aspek sosial dan filosofis, pendidikan sebagai layanan publik memiliki misi untuk menyatukan sosial di tengah keragaman. Sekolah dan lembaga pendidikan berfungsi sebagai "ruang publik" di mana nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan gotong royong diajarkan dan diterapkan. Dengan menjamin pendidikan yang bebas dari diskriminasi, negara sedang membangun dasar bagi masyarakat yang beradab dan memiliki kesadaran kolektif. Visi ini lebih dari sekadar mencapai nilai akademik, karena tujuan akhirnya ialah menciptakan warga negara yang bertanggung jawab secara moral terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.

Sebagai kesimpulan, tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan sebagai hak yang mendasar adalah keselarasan antara regulasi dan pelaksanaannya di lapangan. Negara harus berperan tidak hanya dalam penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga dalam memastikan kualitas pengajaran, kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta aksesibilitas teknologi informasi. Keadilan pendidikan dapat tercapai ketika seorang anak di daerah terpencil mendapatkan kualitas pengajaran yang setara dengan

anak-anak yang tinggal di pusat kota. Dengan memperkuat komitmen ini, pendidikan akan benar-benar menjadi pendorong menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Implikasi Filosofis terhadap Pendidikan sebagai Layanan Publik

Analisis filosofis mengenai hubungan antara manusia, kekuasaan, dan pendidikan menjadikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan pendidikan sebagai layanan publik yang bermartabat. Pendidikan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai proses mekanis untuk menciptakan tenaga kerja, tetapi lebih kepada pengembangan manusia secara keseluruhan. Ini mencakup keseimbangan antara intelektual, moralitas, kepekaan sosial, dan kedalaman spiritual. Dengan menganggap manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai dimensi, negara melalui sistem pendidikannya berkewajiban menciptakan ruang untuk pertumbuhan yang memungkinkan setiap individu meraih potensi kemanusiaan mereka yang tertinggi (Herlambang 2021).

Dalam praktiknya, kekuasaan memegang peranan penting dalam mengarahkan kebijakan pendidikan nasional. Kekuasaan yang dimiliki negara harus diwujudkan melalui kebijakan yang cerdas untuk memastikan keadilan dan pemerataan, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi hak eksklusif bagi beberapa kelompok tertentu. Tanggung jawab ini mendorong negara untuk hadir dalam pengalokasian sumber daya, membangun infrastruktur serta menjamin kualitas pendidikan di seluruh daerah, termasuk di lokasi-lokasi yang terpencil. Dengan cara ini, kekuasaan berfungsi sebagai penjaga hak konstitusi setiap warga, menjamin tidak ada anak bangsa yang terabaikan dalam mendapatkan akses pengetahuan.

Selanjutnya, pendidikan sebagai layanan publik perlu mampu mengubah posisi individu dalam masyarakat. Masyarakat tidak seharusnya hanya dianggap sebagai objek pasif dari sistem atau penerima layanan tanpa daya, tetapi harus dibentuk menjadi subjek yang aktif dan berdaya (Fatmawati 2019). Dengan mengembangkan kesadaran kritis, pendidikan mempersiapkan warga dengan kemampuan untuk menganalisis situasi, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Individu yang terdidik dengan cara kritis akan menjadi penjaga demokrasi yang tangguh, menjaga agar kekuasaan senantiasa berada dalam jalur keadilan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah syarat penting dalam pengelolaan pendidikan agar benar-benar berfokus pada kepentingan masyarakat secara luas. Sebagai layanan publik, setiap langkah dalam pengambilan kebijakan, penggunaan anggaran, sampai penentuan kurikulum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ketidakjelasan informasi atau praktik korupsi dalam sektor pendidikan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai filosofis pendidikan itu sendiri. Dengan sistem yang bersifat transparan, kepercayaan publik akan meningkat, sehingga kolaborasi antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat dapat berjalan baik untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Sebagai akhir, tujuan utama dari keselarasan antara manusia, kekuasaan, dan pendidikan adalah terciptanya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan beradab. Pendidikan yang dikelola dengan prinsip keadilan sosial akan berfungsi sebagai pendorong mobilitas vertikal dan distribusi ekonomi yang lebih merata. Ketika setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berakhlak baik, maka pondasi bangsa akan semakin kuat. Visi besar ini hanya bisa terwujud jika semua pemangku kepentingan setuju bahwa pendidikan merupakan investasi peradaban yang paling penting, melampaui kepentingan politik jangka pendek demi masa depan generasi yang akan datang.

Relasi Manusia, Kekuasaan, dan Pendidikan dalam Perspektif Filosofis

Hubungan antara manusia, kekuasaan, dan pendidikan merupakan sebuah trias yang membentuk fondasi peradaban. Manusia, sebagai subjek sekaligus objek, menempatkan pendidikan sebagai proses humanisasi untuk mencapai derajat kemanusiaan yang utuh. Dalam konteks ini, pendidikan bukan sekadar transfer informasi, melainkan upaya sadar untuk memerdekakan potensi insani dari belenggu ketidaktahuan. Namun, proses ini tidak terjadi di ruang hampa; ia selalu bersinggungan dengan kekuasaan yang memiliki otoritas untuk menentukan arah, kurikulum, dan aksesibilitas pendidikan tersebut, sehingga ketiganya saling memengaruhi secara timbal balik (Halim et al. 2025).

Kekuasaan dalam sistem pendidikan sering kali bermanifestasi dalam bentuk kebijakan publik dan regulasi yang mengatur bagaimana ilmu pengetahuan didistribusikan. Pendidikan memegang peranan krusial sebagai instrumen perubahan sosial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan Sejahtera

(Lumbanraja 2026). Namun, terdapat risiko ketika kekuasaan menjadikan pendidikan sebagai alat indoktrinasi untuk mempertahankan status quo. Oleh karena itu, penting bagi otoritas politik untuk menyadari bahwa fungsi utama kekuasaan dalam pendidikan adalah sebagai fasilitator yang menjamin hak belajar warga negara, bukan sebagai pemaksa kehendak ideologis yang membatasi ruang gerak intelektual.

Lebih jauh lagi, pendidikan yang ideal harus mampu melahirkan manusia yang memiliki kesadaran kritis terhadap realitas di sekitarnya. Pendidikan tidak boleh hanya mencetak tenaga kerja yang patuh, tetapi harus membentuk pribadi yang mampu mempertanyakan ketidakadilan. Ketika pendidikan berhasil menanamkan nilai-nilai demokrasi dan nalar kritis, maka manusia yang dihasilkan akan mampu mengontrol jalannya kekuasaan. Hal ini mencegah kekuasaan terjatuh ke dalam otoritarianisme, karena masyarakat memiliki "daya tangkal" intelektual untuk mengarahkan kebijakan negara agar tetap berpihak pada kemaslahatan umum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Ketimpangan hubungan antara ketiga unsur ini dapat berakibat fatal pada hilangnya esensi pendidikan itu sendiri. Jika kekuasaan mendominasi terlalu jauh, pendidikan akan kehilangan roh kemanusiaannya dan berubah menjadi komoditas atau alat kontrol politik semata. Sebaliknya, pendidikan yang tercerabut dari realitas kekuasaan akan menjadi menara gading yang tidak relevan dengan persoalan sosial. Maka, keseimbangan yang dinamis sangat diperlukan; di mana manusia menggunakan pendidikan untuk memahami hak-haknya, dan kekuasaan memberikan sarana bagi pendidikan untuk berkembang tanpa intervensi yang mematikan kreativitas.

Sebagai kesimpulan, integrasi yang harmonis antara manusia, kekuasaan, dan pendidikan adalah kunci menuju masyarakat yang beradab. Pendidikan harus dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan potensi individu dengan tanggung jawab sosialnya dalam kerangka kenegaraan. Dengan memposisikan pendidikan sebagai sarana pemberdayaan, kita dapat memastikan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh manusia akan selalu berorientasi pada keadilan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Perubahan sosial yang diidamkan hanya dapat terwujud jika pendidikan tetap menjadi ruang yang merdeka, kritis, dan inklusif bagi setiap anggota masyarakat.

KESIMPULAN

Dasar filosofis pendidikan adalah landasan konseptual yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan pengembangan manusia. Pendidikan bukan hanya sekedar proses mekanis untuk memindahkan informasi, melainkan usaha untuk "menginformasikan manusia" yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, termasuk aspek intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Dengan dukungan filosofis yang kuat, pendidikan dapat mempertahankan esensinya untuk membentuk individu ideal yang tidak hanya pintar dalam aspek kognitif, tetapi juga memiliki integritas karakter dan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam.

Dalam interaksi sosial, hubungan antara individu, kekuasaan, dan pendidikan membentuk sebuah trias yang saling mempengaruhi. Pendidikan tidak pernah bersifat netral karena selalu terhubung dengan otoritas kekuasaan yang menetapkan kebijakan dan kurikulum. Meskipun ada kemungkinan kekuasaan menggunakan pendidikan sebagai sarana indoktrinasi atau mempertahankan kondisi yang ada, secara filosofis pendidikan perlu dikembalikan pada fungsinya sebagai alat untuk emansipasi. Pendidikan yang ideal adalah yang mampu menciptakan kesadaran kritis, sehingga individu tidak hanya menjadi objek pasif dari sistem yang ada, melainkan subjek yang dapat mengendalikan dan mengarahkan kekuasaan menuju keadilan.

Sebagai sebuah layanan publik, pendidikan merupakan tanggung jawab fundamental dan konstitusional bagi negara. Negara harus memastikan bahwa pendidikan tidak diperlakukan sebagai komoditi ekonomi yang bersifat diskriminatif, tetapi sebagai barang publik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya rintangan baik geografis maupun finansial. Investasi dalam layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bukan hanya beban anggaran, melainkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas nasional dan memutus siklus kemiskinan antar generasi demi mencapai kesetaraan kesempatan bagi setiap anak bangsa.

Secara keseluruhan, pendidikan mengemban misi besar sebagai alat untuk transformasi sosial dan pembebasan masyarakat. Melalui pendekatan yang dialogis dan kritis seperti yang diperjuangkan oleh Paulo Freire pendidikan menjadi ruang praktik demokrasi yang mengajarkan toleransi, kerjasama, dan kepedulian sosial dalam keragaman. Dengan manajemen yang transparan, akuntabel, dan adil, kolaborasi

antara manusia, kekuasaan, dan pendidikan akan menjadi penggerak utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, bermartabat, dan beradab di masa depan.

REFERENSI

Darmiyati Zuchdi, Ed D. 2023. *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi*. Bumi Aksara.

Faratunnisa, A Nurul, and Nur Afifah. 2024. "Kajian Makna Sistem Dalam Fondasi Pendidikan Nasional Indonesia." *Jurnal Saraweta* 2 (2): 108–19.

Fatmawati, Erma. 2019. "Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektf Peran Birokrasi Dan Partisipasi Masyarakat." *Jieman* 1 (1): 58–76.

Fauzi, Muhammad, Nunung Dwi Setiyorini, Hery Setyowati, Andry Irdyansah, and Ahmad Shofi Mubarok. 2025. *Pendidikan Multikultural: Teori, Praktik, Dan Transformasi Sosial*. Penerbit NEM.

Halim, Marwa, Efira Andiyani Batubara, Awal Kurnia Putra Nasution, Ryan Dallion, Ricki Ananda, Iqbal Kamil Siregar, Bachtiar Efendi, Esra Parmian Talenta Siburian, Hikmah Hafidza, and Oktaviana Bangun. 2025. *Transformasi Paradigma Filsafat Pendidikan Di Era Digital: Dari Humanisme Ke Posthumanisme Dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi*. Serasi Media Teknologi.

Herlambang, Yusuf Tri. 2021. *Pedagogik: Telaah Kritis Ilmu Pendidikan Dalam Multiperspektif*. Bumi Aksara.

Irianto, H Agus. 2017. *Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Kencana.

Lumbanraja, Victor. 2026. *Manajemen Pelayanan Publik: Konsep, Strategi, Dan Implementasi Di Era Kontemporer*. Star Digital Publishing.

Mohamad Nazir. 2015. "Metode Penelitian," 111.

Prihatin, Eka, and S Pd Sutangsa. 2025. *Transformasi Kebijakan Pendidikan: Dari Konsep Hingga Pelaksanaan Di Era Digital*. Indonesia Emas Group.

Rosita, Lilis. 2018. "Peran Pendidikan Berbasis Karakter Dalam Pencapaian Tujuan Pembelajaran Di Sekolah." *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM* 8.

Sutianah, Cucu. 2022. *Landasan Pendidikan*. Penerbit Qiara Media.

Syarifudin, Aip. 2025. *DINAMIKA FILSAFAT PENDIDIKAN: Landasan Teoretis Untuk Transformasi Pendidikan Dan Masyarakat*. PT. Harmoni Anak Negeri.

Tilaar, Henry Alexis Rudolf. 2003. *Kekuasaan Dan Pendidikan: Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural*. IndonesiaTera.